

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK
DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KASUS ISTRI
PETANI YANG BEKERJA MEMBANTU MENCARI NAFKAH
KELUARGA DI DESA PUCUK KECAMATAN
DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh:

Mohamad Nur Samsudin

NIM (C31213101)



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

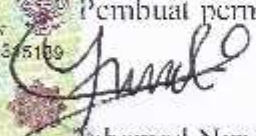
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Mohamad Nur Samsudin
NIM : C31213101
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 12 Februari 2018
Pembuat pernyataan,

Mohamad Nur Samsudin
C31213101

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Nur Samsudin NIM. C31213101 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



A. Kemal Riza, S.Ag.,MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji II,



Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 195405251985031001

Penguji III,



Dr. Ita Musyarofah, SHI, M. Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

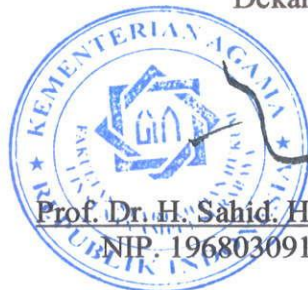
Surabaya, 13 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid, HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Nur Samsudin NIM. C31213101 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 25 Januari 2018.
Pembimbing

A.Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohamad Nur Samsudin
NIM : C31213101
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : nursyamsuddin95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KASUS ISTRI PETANI YANG BEKERJA MEMBANTU Mencari nafkah keluarga di desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13, Februari 2018

Penulis

(MOHAMAD NUR SAMSUDIN)
nama terang dan tanda tangan

Namun, jika istri bekerja sebagai TKW, maka hal itu tidak sesuai dengan tugas utama seorang istri. Dia memiliki tugas utama untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Sebagaimana bunyi hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Imam Bukhori bahwa istri sebagai penanggung jawab rumah tangga suami dan anak. Selain itu juga diatur dalam Pasal 83 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban istri yang berbunyi: “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.” Berbeda halnya dengan fakta yang terjadi pada masyarakat Arjowilangun, para istri lebih memilih bekerja menjadi TKW, karena bagi mereka bekerja menjadi TKW merupakan solusi yang sangat tepat. Sehingga menyebabkan para istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam keluarga. Sebenarnya skripsi ini memiliki kesamaan pada ruang lingkup permasalahannya dengan skripsi yang penulis susun. Akan tetapi subjek penelitiannya yang berbeda, pada skripsi Siti Fadhilatur Rahma subjek penelitiannya adalah keluarga TKW di Desa Arjowilangun, sedangkan subjek yang akan dibahas oleh penulis adalah kasus istri petani di Desa Pucuk.

Kedua, Nur Rosyidin, dengan judul skripsi, Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Parimono Desa Plandi Jombang).¹³ Skripsi ini membahas peranan istri sebagai pencari nafkah keluarga. Padahal yang diperintahkan untuk mencari nafkah keluarga ialah suami. Seorang istri diperkenankan bekerja

¹³ Nur. Rosyidin, “Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Peranan Istri sebagai Pencari nafkah Keluarga’ (Studi Kasus di Parimono Desa Plandi Jombang)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 49.

untuk membantu suami asalkan tidak meninggalkan kewajiban mengurus rumah tangga dan mendidik anak anaknya. Dalam skripsi ini seorang istri bekerja menjadi buruh pabrik. Meskipun istri sebagai pencari nafkah keluarga, namun dia dapat memenuhi kewajiban untuk mendidik anak anaknya, mengurus rumah tangga dan dapat terpenuhinya kebutuhan biologis antara suami dan istri. Skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan dengan skripsi yang penulis susun, akan tetapi memiliki perbedaan yaitu dilihat dari jenis pekerjaan istri. Di dalam skripsi yang disusun oleh penulis istri berprofesi sebagai petani seperti halnya seorang suami yang bermata pencarian sebagai petani. Sehingga seorang istri memiliki peran yaitu mencari nafkah keluarga dan mengurus rumah tangga.

Ketiga Sri Rahayu, dengan judul skripsi “Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolupo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)”¹⁴ Skripsi ini menjelaskan bahwa sejatinya seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga, sedangkan istri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tetapi dalam hal ini seorang istri yang harus memenuhi nafkah keluarganya. Hal ini disebabkan karena suami kurang bertanggung jawab dan lalai dengan kewajibannya. Pokok permasalahan ini adalah apa saja pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap

¹⁴ Sri. Rahayu, “Pengaruh Istri sebagai Pencari Nafkah Utama terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolupo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten temanggung)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 56.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori dalam penelitian ini yang meliputi hak dan kewajiban serta nafkah, suami istri menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Bab ketiga berisi penyajian data, berisi mengenai data umum Desa Pucuk dan juga data Petani di Desa Pucuk. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran Desa yang akan diteliti. bab ini mencakup : gambaran umum Desa Pucuk, istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga, dan pandangan masyarakat Desa Pucuk terhadap peran istri Petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga.

Selanjutnya Bab empat adalah analisis data, yaitu analisis data terhadap tradisi istri Petani dalam membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, dan analisis hukum Islam terhadap tradisi istri petani dalam membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kab Mojokerto.

Skripsi ini diakhiri dengan Bab lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan yang menjawab secara ringkas pokok masalah yang diteliti dan selanjutnya juga saran yang bersifat membangun terkait permasalahan yang penulis teliti.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA NAFKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Apabila masing masing suami istri menjalani kewajiban dan memperhatikan tanggung jawab masing masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami istri dalam rumah tangga. Pengaturan hak dan kewajiban merupakan wujud dari kemanusiaan dan keadilan.

Tujuan dari pernikahan akan terwujud, apabila masing masing pasangan siap melakukan perannya secara positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal dan abadi. Semua itu telah diatur oleh Islam yang berkaitan dengan hukum umatnya secara adil dan proporsional tidak ditambah atau dikurangi karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Apabila akad nikah berlangsung dan sah menurut syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian perkawinan akan menimbulkan juga hak dan kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.¹ Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.² Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan Hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga. Keharmonisan suatu keluarga sangat dipengaruhi dari pasangan suami istri, karena suami istri akan hidup bersama selama pernikahan itu berlangsung.

Suami dan istri memiliki peran masing masing dalam sebuah keluarga. Maka di sini pasangan suami istri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya.³ Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri.

¹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: PT Pustaka Setia, 1999), 157.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 165.

³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur: Kencana 2003), 164.

Adanya pengaturan hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ

Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Maka kewajiban istri merupakan hak bagi suami, namun suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pada istri. Yaitu sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh ujung ayat di atas.

Untuk itu kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan (materi).
2. Hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan.⁵

Dari kedua kewajiban tersebut suami harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik baiknya. Adapun kewajiban suami yang berkaitan dengan materi (kebendaan) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mahar, mahar merupakan pemberian pertama oleh suami kepada istrinya yang dilakukan ketika akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid I, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 133.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 87.

itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu berlangsung.⁶

2. Nafkah, setelah mahar dibayarkan maka akan timbul kewajiban lainnya yaitu nafkah. Hukum membayar atau memberi nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian maupun tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul karena sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.⁷

Untuk selanjutnya kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat kebendaan (bukan materi) adalah sebagai berikut:

1. Menggauli istrinya secara baik dan patut.⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisā ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَبِجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan pergaulilah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁹

Yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut di sini adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ...,87.

⁷ Ibid., 166.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Prenadea, 2006), 160.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2..., 133.

pemenuhan kebutuhan seksual, bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat ini diistilahkan dengan cara yang makruf yang mengandung arti secara baik. Sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.¹⁰ Selain itu yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus juga menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau meyakiti perasaan istri.

2. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.¹¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah surat At-Tahrīm ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلٰیهَا مَلٰٓئِكَةٌ
غٰلِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹²

Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama dalam keluarga, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Suami juga wajib memberikan pendidikan agama maupun

¹⁰ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika 2004), 161.

¹¹ Ibid.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 10..., 203.

pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.

3. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu *sakinnah, mawaddah, wa rahmah*.¹³ Untuk itu, suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang serta perlindungan kepada istrinya. Agar dalam suatu perkawinan dapat tercipta suatu hubungan ikatan pernikahan yang kuat dan langgeng. Sehingga terbentuklah keluarga yang seperti diperintahkan oleh Allah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rūm 30 ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁴

- Kompilasi Hukum Islam juga mengatur Mengenai kewajiban suami yang terdapat pada pasal 80 yang berbunyi:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

¹³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan ..., 162.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 10 ..., 343.

2. suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b adalah mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya tersebut pada ayat 4 huruf a dan b,
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.¹⁵

Pada pasal 80 ini dapat dipahami bahwa kewajiban suami kepada istrinya akan menimbulkan suatu perbedaan tingkatan dimana pada sisi lain suami sebagai pembimbing dan pada sisi lain juga keputusan yang bersifat penting diputuskan secara bersama antara suami dan istri. Semua yang disebutkan di atas akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga.

Sementara itu pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga mengatur akan kewajiban suami yang berbunyi : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹⁶ Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat

¹⁵ Pasal 80 *Kompilasi Hukum Islam*

¹⁶ Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah antara satu pihak dan pihak lainnya yang mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri. Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak bersama, yaitu sebagai berikut:

1. Bolehnya bergaul dan bersenang senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan mushaharah.
3. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.¹⁷

Sementara itu kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi ialah:

1. Taat dan patuh kepada suami.
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
3. Mengatur rumah dengan baik.

¹⁷ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*,163.

4. Menghormati keluarga suami.
5. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami.
6. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.
7. Ridla dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
8. Selalu berhemat dan suka menabung.
9. Selalu berhias dan bersolek untuk atau dihadapan suami
10. Jangan selalu cemburu buta.¹⁸

Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam, dan ihsan yang mana unsur-unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih, dan sayang. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain: kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.¹⁹ Sehingga pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih, dan sayang.

¹⁸ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*,179.

¹⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007), 147.

B. Nafkah keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974

1. Pengertian nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu kata *infaqo – yunfiqo – infaqon* Secara etimologi berarti pengeluaran atau pembelanjaan,²⁰ juga berarti hilang atau pergi. Bila seseorang di katakan memberi nafaqah maka akan membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain.²¹ Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya (keluarganya) sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian, *nafaqah* istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan. Maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.²²

2. Dasar hukum nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya terdapat pada Al-Quran dan al-hadits. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, pembelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya

²⁰ A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1548.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*,16°.

²² H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, edisi ke 2 (Jakarta: Pustaka Amani),76.

adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya, tanpa melihat kepada keadaan istri.

Diantara dasar hukum kewajiban suami memberikan nafkah terdapat pada Al quran dan hadis yaitu :

a. Al quran surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Para ibu hendaklah menyusukan anak anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.²³

b. Al Quran surat At Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa jumlah besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun minimal. Tidak adanya ketentuan yang

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid I ..., 161.

pasti yang menjelaskan berapa ukuran nafkah, justru menunjukkan betapa fleksibelnya agama Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

c. Hadis bukhori muslim terhadap kewajiban memberi nafkah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberi nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang akau ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: “ambilah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁴

Ibn rusd dalam kitab nya *Bidayah Al-mujtahid*, mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah, bahwa ukuran besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara, akan tetapi berdasarkan keadaan masing masing suami-istri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat.

Syarat syarat wajib nafkah yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya istri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan ayat dan hadits sesuai uraian di atas. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah istri berhak mendapatkan nafkah. Tetapi terdapat pula ulama yang berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah diperoleh ketika terjadi akad atau setelah adanya tamkin atau setelah istri pindah ke kediaman suami. Hal ini di sebabkan karena tidak ada ketentuan

²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shohih Bukhori*, cet. 1 (Beirut: Dar Ibni Katsir, 2002), 1294.

husus dari nabi SAW mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan syarat syarat wajibnya seorang istri mendapatkan hak nafkah.

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pada pasal 34 juga di jelaskan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Adapun yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah, yaitu:

Pasal 80 Ayat 2 yang berbunyi ;

Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 80 Ayat 4 ;

Sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung:

- a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.²⁵

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 di sebutkan bahwa nafkah dibebankan kepada suami adalah mengacu pada pasal 34 yang berbunyi :

²⁵Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam.

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²⁶

Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian. Adanya aturan tentang nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan suatu persoalan tatkala dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami istri ketika terjadi perceraian.

²⁶ Pasal 34 Undang Undang Perkawinan di Indonesia No 1 Tahun 1974.

